

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT (STUDI KASUS TAHUN 2009-2012)

OLEH:

M. KHALIL QIBRAN

B 111 08 138

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK
DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT
(STUDI KASUS TAHUN 2009-2012)**

OLEH:

**M. KHALIL QIBRAN
B 111 08 138**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **KHALIL QIBRAN**

Nomor Induk : **B 111 08 138**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH
ANAK DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT
(STUDI KASUS TAHUN 2009-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Makassar, Juni 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 19470915 197901 1 001

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **KHALIL QIBRAN**

Nomor Induk : **B 111 08 138**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH
ANAK DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI
BARAT(STUDI KASUS TAHUN 2009-2012)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Juni 2014

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

M. Khalil Qibran (B111 08 138), Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012), di bawah bimbingan H. M. Imran Arief selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dilakukan oleh Anak dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor kabupaten Mamuju dengan teknik wawancara langsung dan penelusuran dokumen-dokumen penelitian di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan 2 (dua) jenis sumber data yaitu number data Primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian. sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah ada atau melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Mamuju diantaranya adalah : faktor rasa ingin tahu, faktor ikut-ikutan teman, faktor Lingkungan keluarga, faktor Lingkungan Pergaulan, faktor penjualan secara bebas. Sedangkan penanggulangan kejahatan tersebut juga bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada Rasul Allah, **Muhammad SAW**, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)”** merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda **M. Kamal Nasser** dan Ibunda **Marintani Erna** yang senantiasa mendoakan, merawat, memotivasi, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Kepada saudara-saudara penulis, adinda Faisal Maliq, Aulia Insani, Fajar Ramadhan dan Resky Hijrah yang

tiada henti-hentinya selalu memberikan nasehat dan mendukung dalam setiap pilihan hidup yang penulis jalani.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng. S.H., M.H., Wakil Dekan II Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan S.H., M.H., dan Bapak Kaisaruddin, S.H., selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhaddar, S.H., M.S., dan Ibu Hj. Nur Azisa S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

6. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta bantuan moril kepada penulis selama kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kapolres Mamuju beserta seluruh jajarannya, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian penulis sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan (Notaris) 2008 Unhas tanpa terkecuali, serta para senior dan junior yang ikut membantu penulis dalam segala hal hingga penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar penulis, mohon maaf atas segala tulisan yang tidak berkenan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	9
1. Pengertian Kriminologi	9
2. Ruang Lingkup Kriminologi	16
3. Pembagian Kriminologi	18
4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi.....	19
B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.....	21
C. Pengertian dan Batas Umur Anak.....	23
D. Minuman Beralkohol dan Jenis-jenisnya.....	27
E. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol dan Dampak Minuman Beralkohol	32

F. Teori Tentang Sebab-sebab Timbulnya Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	53
B. Teknik Pengumpulan Data	53
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Analisis Data	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data dan Kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Mamuju	56
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Mamuju.....	61
C. Hambatan dan Upaya-upaya Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Mamuju.....	67
D. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Meneliti Kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkahlaku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan Indonesia.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkahlakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah.

R. Abdoel Djamali (2005:26) mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Seperti yang diketahui Tulieus Cicero (Bachsan Mustafa, 2003:12) menyatakan "*ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat *disitu ada hukum*". Dengan demikian masyarakat dan hukum saling terkait.

Dalam hal ini, tentu ingin diwujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegak hukum yang adil karena sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di negara Indonesia.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan secara umum yang kita ketahui seperti :

- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaraan bermotor;

- 2) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi;
- 3) Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase dan sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- 5) Kejahatan konvensional yang meliputi perampokan termasuk bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan;
- 6) Kejahatan terorganisasi seperti pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi, peredaran narkoba dan sebagainya; dan
- 7) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

Berdasarkan persoalan yang penulis uraikan tersebut di atas, hal ini juga didukung dengan seringnya terjadi aksi main hakim sendiri terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang tertangkap tangan dalam melakukan kejahatan misalnya seorang pencuri yang dikoroyok massa atau bahkan dibakar massa karena tertangkap tangan oleh warga ketika sedang melakukan pencurian.

Hal ini terjadi karena menurut masyarakat bahwa kalau pelaku kejahatan dibawa ke sidang pengadilan untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku boleh jadi terdakwaanya bebas atau dihukum tetapi hukumannya ringan tidak setimpal dengan

perbuatannya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa lebih baik pelaku dieksekusi oleh warga/massa daripada diberikan kepada aparat kepolisian untuk ditangani.

Salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasar adalah untuk menakut-nakuti, pandangan ini dianut sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 dengan jalan menjatuhkan hukuman yang berat, seperti hukuman mati, karena tujuan yang ingin dicapai pada saat itu adalah bagaimana masyarakat pada umumnya dapat terlindung dari kejahatan.

Tetapi dalam kurun waktu selanjutnya terjadi aksi penentangan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memberlakukan penjahat dengan sangat kejam aksi penentangan ini dilakukan oleh ilmuan terkenal Montesquieu (1994:23).

Tetapi di sisi lain ternyata dalam kurung waktu pemberlakuan penjahat dengan sangat kejam tersebut ternyata justru dapat memberikan perlindungan keamanan masyarakat terhadap parapenjahat karena aksi kejahatan pada saat itu cenderung mengalami penurunan.

Seperti contoh terjadi di Mamuju awal tahun 2013, Penangkapan terhadap preman jalanan yang dilaporkan sejumlah warga karena sering pesta minuman keras yang sangat meresahkan warga di jalan Mangga Kabupaten (Kab.) Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar). Aparat kepolisian melakukan penyisiran pada tengah malam dan berhasil

menangkap beberapa pelaku serta barang bukti berupa minuman keras dan preman tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Mamuju guna dimintai keterangan.

Karena tingkat kejahatan yang terjadi dengan proses hukum yang cenderung cepat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi, maka upaya tersebut dianggap efektif untuk meminimalisasi tingkat kejahatan dan ternyata hal tersebut terbukti, karena sejak terjadinya aksi penembakan para preman - preman tingkat kejahatan menurun drastis di Ibukota, tetapi di sisi lain hal itu justru bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu bahwa setiap orang harus dipandang tidak bersalah sepanjang belum ada putusan hakim yang bersifat tetap yang memutuskan bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah dan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Sering ditemukan di pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol/minuman keras. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian. Minuman beralkohol tidak hanya dikonsumsi orang dewasa tetapi juga oleh Anak.

Spesifikasi kejahatan anak menjadi masalah sosial dan merupakan hukum yang telah tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan juga bagi hukum. Faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan penjelasan

tentang pelaku kejahatan anak. Masyarakat pada umumnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencegah serta menekan kemungkinan anak melakukan kejahatan. Asas hukum perlindungan Anak adalah asas usia yang belum dewasa yang merupakan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggung-jawabkan tindak pidana.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kab. Mamuju Sulawesi Barat (Tahun 2009-2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat?
- 2) Upaya apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 2) Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

A.S. Alam (Amir Ilyas, 2001:9), mengemukakan bahwa:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh aliran positivisme. Namun elemen-elemen kriminologi telah dikenalkan oleh para filosofi Yunani kuno yaitu Plato (427-347 SM) dalam bukunya *Republic*, yang antara lain menyatakan bahwa *gold, human* merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384-322 SM) menyatakan bahwa properti menimbulkan *crimen* dan *rebellion*. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, didorong oleh hukum pidana baik materil maupun formal serta sistem penghukuman yang sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formiil. Perbedaan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formiil yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Edwin Sutherland (A.S. Alam 2010:3) mengemukakan bahwa :

Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia,

statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini.

George C. Vold (H.R Addussalam, 2007:4), menyatakan bahwa :

Dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan pada masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat-istiadat.

Soejono Dirjosisworo (1985:4) mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut :

Dari segi Etimologi, istilah kriminologi terdiri atas 2 suku kata yaitu "*crime*" (kejahatan) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:12) berpendapat bahwa :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh parah anggota masyarakat.

Soedjono Dirjosisworo (1985:24) memberikan defenisi kriminologi adalah :

Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia

dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Menurut Sutherland (T. Effendi, 2009:3) mengemukakan bahwa:

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan fakto-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

G. P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984:20), mengemukakan bahwa :

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan diskriminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Menurut Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001:9), memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari. Dengan adanya kriminologi, dapat dilakukan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan

tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Topo Santoso dan Eva Achjani, (2001:11), mengemukakan bahwa :

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku (tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Selanjutnya menurut Wolfrang Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001:12), bahwa, kriminologi adalah :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.

Lanjut Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2001:11) memberikan definisi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis);
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat di nilai dari sudut jiwanya;
4. Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa; dan

5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Sutherland (Soedjono D, 1985:11), kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. *Sociology of law* (sosiologi hukum), mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum;
2. *Etiologi criminal*, mencari secara analisa sebab-sebab dari pada kejahatan; dan
3. *Penologi*, ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan, bahwa objek kriminologi adalah (T. Effendi, 2009:3) :

1. Kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di definisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran

terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana.

2. Pelaku.

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Menurut Noac, Kriminologi adalah pengetahuan tentang bentuk gejala, sebab dan akibat dari kejahatan dan tingkah laku tercela. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata dibatasi oleh undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang

oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan, atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana, delik hukum khususnya tindak pidana di bedakan menjadi kejahatan buku II Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik undang-undang yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP). (<http://www.scribd.com/doc/50360312/KRIMINOLOGI-1>, 03 April 2012).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu– menyelidiki – mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dengan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Dengan lebih jelasnya mengenai kriminologi, maka penulis akan menguraikan pengertian tentang kejahatan. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*).

Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita,

kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menerapkan norma-norma hukum dan ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi.

Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa :

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomenasosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Didalam keseharian, terdengar berbagai komentar suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lainnya. Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasa tentang ruang lingkup kejahatan.

Menurut A.S. Alam (Amir Ilyas, 2001:2), ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*); dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan

kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menurut Sutherland (T. Effendi, 2009:15), kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologikriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. *Penologi*, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya; dan
- c. Sosiologihukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-

perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

3. Pembagian Kriminologi.

Menurut A.S. Alam, (Amir Ilyas, 2010:4), kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis.

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
4. Psikologi dan NeuroPatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya; mempelajari penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
5. Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :

1. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat dalam melakukan kejahatannya.
3. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi.

Menurut I. S. Susanto, (1991:3), yang dimaksud aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

a. Kriminologi Klasik

Dalam pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Ini berarti

manusia mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat.

b. Kriminologi Positivis.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis dan kultural.

Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri daripada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-

proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Kejahatan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*" atau yang biasa diartikan sebagai "kejahatan remaja" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Wikipedia orang yang merupakan situs ensiklopedia bebas, istilah remaja dapat diartikan sebagai waktu manusia berumur belasan tahun, dimana pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal.

B. Simanjuntak (1997: 320 – 321) berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah :

- Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
- Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi “Anak Nakal” adalah :

Anak yang melakukan tindak pidana; atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami kegoncangan pada masa menjelang kedewasaan, dimana tindakan-tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa perubahan menjelang kedewasaan itu dapat dilewati dengan baik tanpa terjadi tindakan-tindakan yang menjurus ke arah perbuatan kriminal.

C. Pengertian dan Batas Umur Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak anak atau *United Nation Convention on Right of the chid*. Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation standard Minimum Rules for the Administration of juvenile delinquency* ("The Beijing Rules"). Tahun 1985 dan *Deklarasi Hak Asasi Manusia atau universal Declaration of human Rights* Tahun 1948.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum

Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuannya masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari segi usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan

tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) mengemukakan bahwa :

Amerika Serikat batas umur anak 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas tahun). Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batasan umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/30 tentang *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.

Adapun untuk batasan umur maksimal 18 (delapan belas) tahun dirasakan cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 buah Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang hak - hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya :

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 mengemukakan bahwa :

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum berumur genap 21 tahun maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali. Hal ini berarti hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batas umur seorang anak.

D. Minuman Beralkohol dan Jenis-jenisnya

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 tentang minuman keras yakni :

dijelaskan bahwa Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan :

Adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Klasifikasi, Jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)

- b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang memabukan bila diminum misalnya, Beer, Anggur, dan sebagainya (Minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukan misalnya Tuak, Saguweer dan sebagainya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Istilah alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu Al Kuhl yang artinya sari pati atau sari inti. Secara alami alcohol dapat terjadi pada buah-buahan yang terlalu masak seperti durian, nangka, mangga dan sebagainya. Secara buatan alkohol dapat dibentuk melalui proses fermentasi dari sumber-sumber karbohidat oleh mikroba yang ditumbuhkan pada bahan tersebut, mikroba ini banyak jenisnya,

sehingga mampu menghasilkan bermacam-macam minuman beralkohol, misalnya *Saccaromyces cereviseae* yang telah lama digunakan dan *Kiuyyeremeyeces Fragilis*.

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif, zat psikoaktif adalah golongan zat yang berkerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada prilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat sesuatu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi yang ringan sampai yang berat.

Alkohol yang dikenal sehari-hari yang terdapat dalam minuman adalah etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH , etanol adalah jenis alcohol yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri. Senyawa ini dapat diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (gula). Bahan baku yang digunakan beragam seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman palma dan limbah hasil pertanian. Industri etanol telah dikenal cukup lama dan diproduksi secara besar-besaran. Metode pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan proses fermentasi atau dengan cara sintetis.

Untuk menyelamatkan umat, terutama umat Islam dari minuman keras atau beralkohol, Lukman Harun (1997:13) mengemukakan bahwa : Karena itu, untuk menyelamatkan umat Islam dari kehancuran akibat

minuman keras, harus diantisipasi sedini mungkin. Gubernur dan Walikota/Bupati harus peka terhadap peredaran minuman keras. Untuk itu Indonesia yang mayoritas muslim harus lebih tegas dalam menetapkan larangan minuman keras.

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, merumuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah :

- Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji - bijian, nira, dan lain sebagainya atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86 / 1977).
- Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman - minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol.
- Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk kedalam minuman beralkohol.
- Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
- Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil ataupun keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

E. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol dan Dampak Minuman Beralkohol.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Adapun uraian dari ketentuan di atas adalah :

- Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang
Minuman beralkohol.

Menurut penulis, Keputusan Presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol Pasal 34 mengemukakan bahwa:

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 Tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf f di jelaskan bahwa :

Untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralhokol, Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan

minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Mamuju.

Menjual minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat , dan lain-lain sebagainya.

Selain itu penulis berusaha menggambarkan secara umum faktor yang mempengaruhi dan dampak minuman beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol setiap Negara berbera-beda tergantung pada kondisi sosio cultural, kekuatan ekonomi, pola religious, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di setiap Negara.

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju, namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat di negara berkembang. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi masalah kesehatan yang cukup serius, sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga miras (minuman keras) setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan mayoritas penduduk muslim ini.

Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol justru mengalami peningkatan, bagi banyak kalangan meminum minuman beralkohol hingga mabuk dianggap sebagai sarana kegagahan atau unjuk kejantanan tanpa mereka tahu dampak bagi kesehatan yang akan mereka dapatkan dikemudian hari, alkohol juga dapat mengakibatkan kurangnya produktifitas dalam melakukan pekerjaan.

Penyimpangan perilaku negatif yaitu kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol (Miras) secara berlebihan hingga mabuk, yang pada akhirnya tidak jarang menjadi pemicu lahirnya pelanggaran atau bahkan tindak pidana lain yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, pencurian bahkan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga adalah dilatar belakangi atau diawali dengan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Menurut ahli Kesehatan dr. Musthafa (Koran Tempo 2012 hal. 12), faktor penyalahgunaan minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama tentang respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri, yaitu :

- 1) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan

rasa ingin tahu seseorang (remaja), sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga disebut taraf coba-coba, termasuk mencoba minuman beralkohol.

- 2) Gangguan pengguna alkohol bersifat rekreasional. Pengguna alkohol pada waktu berkumpul bersama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun, atau acara pesta lainnya. Pengguna ini mempunyai rekreasi bersama teman-teman sebayanya.
- 3) Gangguan pengguna alkohol yang bersifat situasional. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual. Hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali pengguna ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stress dan frustrasi.
- 4) Gangguan pengguna alkohol yang bersifat penyalahgunaan. Penggunaan alkohol yang sudah patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu fungsi dalam peran dilingkungan sosial, seperti dilingkungan pendidikan atau pekerjaan.

Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan.

Pengguna alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologi. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat (alkohol), sesuatu kondisi dimana individu yang biasa menggunakan zat adiktif (alkohol) secara rutin pada dosis tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai, sehingga akan menimbulkan gejala sesuai dengan macam zat yang digunakan.

Dari respon individu terhadap penyalahgunaan alkohol seperti tersebut diatas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan adalah

paling berat. Individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti sosial.

Perilaku agresif, emosional, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol. Pada fase eksperimental, rekreasional dan situasional dampak yang muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap ini. Kebut-kebutan dijalan, pesta pora, aktifitas seksual, perkelahian dan tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh sekelompok remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini.

Minuman beralkohol seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia. Dampak ketagihan akibat minuman alkohol tidak tergantung pada jenis alkohol tetapi jumlah yang diminum pada saat itu. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya kondisi seperti tidak dapat berjalan dengan benar dan tidak dapat membuka pintu. Dalam waktu yang singkat ini juga menyebabkan hangover. Hangover lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol, bahan lain dalam alkohol dan akibat ketagihan alkohol. Tanda-tanda hangover adalah sakit kepala, muntah, diare,

gangguan pergerakan usus dan menggeletar selama 8-12 jam kemudian. Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminum selama beberapa bulan atau tahun.

Dampak utama dari seringnya mengonsumsi minuman beralkohol adalah seperti sakit jantung, hati atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini terjadi mereka akan mengalami kurangnya selera makan, kekurangan vitamin, mudah terjangkit penyakit, impotensi. Kematian awal sering terjadi akibat sering minum alkohol. Biasanya terjadi serangan sakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri.

Pada peminum-peminum berat yang sulit disembuhkan akan timbul gejala-gejala sebagai berikut ([health.kompas.com/read/ 2013](http://health.kompas.com/read/2013)) :

- Gangguan kesehatan fisik. Minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pancreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman beralkohol, dapat terjadi pengerasan hati (Cirrhosis hepatitis), peradangan lambung (Gastritis) dan tukak lambung (Ulcus ventriculi).
- Gangguan kesehatan jiwa. Minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah yang berlebihan menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan daya penilaian, kemampuan dan gangguan jiwa tertentu.
- Gangguan fungsi sosial atau pekerjaan.

Akibat meminum minuman beralkohol, dalam perasaan seseorang akan berubah, orang menjadi tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu. Hilangnya daya ingat dan terganggunya kemampuan untuk menilai sesuai judgement (mengakibatkan yang

bersangkutan terpaksa tidak melakukan pekerjaan sehingga dikeluarkan dari pekerjaan. Ada juga yang mengatakan 10 % dari peminum kronis akan menderita Cirrhosis. Sebab kematian yang terpenting pada para peminum kronis adalah terjadinya kegagalan hati (Liver Failure) dan terjadinya Rupture Varises Esofagus sebagai akibat hipertensi portal. Dari sisi lain akibat dari penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali :

- Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Keamanan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang diawali, disertai, bahkan diakhiri oleh pengguna minuman beralkohol.
- Kebiasaan menggunakan minuman beralkohol yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah;
- Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.

F. Teori Tentang Sebab-Sebab Timbulnya Kejahatan Dan Upaya Penanggulangan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa - peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi - konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap

yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang

ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang 4 (empat) teori yang disebut dengan teori *tipologis* atau *Bio-Typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat.

Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Lombroso / Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (1996:16) yaitu :

- Penjahat dilahirkan & mempunyai tipe - tipe yang berbeda
- Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;

- Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

2. Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (1996:18) bahwa :

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.

4. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab - sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya / lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul

karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelektual, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi 13-11-1999) bahwa rumus teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan : (N = Niat, K2 = Kejahatan, K1 = Kesempatan)

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan

dan begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

Karena dampaknya yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya tindak kriminal, seperti rasa was-was, perasaan tidak aman, dan lain-lain, upaya-upaya pengendalian terhadap tindak kriminalitas senantiasa ditingkatkan.

(A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) Mengemukakan Pentingnya upaya ini ditingkatkan adalah karena beberapa hal pokok, yaitu:

1. Tindakan pengendalian kejahatan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pengendalian dan pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan wewenang. Usaha pengendalian adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi, karena untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pengendalian juga dapat dilakukan secara perorangan/sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
2. Usaha pengendalian tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah tindakan yang lebih serius.
3. Usaha pengendalian dapat pula mempercepat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat lebih baik, karena keamanan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, sangat diperlukan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang tengah berlangsung saat ini. Usaha pengendalian

keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyimpangan lainnya dapat merupakan suatu usaha penciptaan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, pada pokoknya adalah usaha perubahan yang positif, khususnya di dalam berubah perilaku kriminal dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Hal ini nampak pada kecenderungan perilaku kriminal pada manusia yang mengandung beberapa unsur, seperti dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto (1989:16) sebagai berikut:

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminil;
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas;
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat;
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Pengendalian yang bersifat langsung menurut Satjipto Raharjo dan Anton Tabah (1993 Polisi Pelaku dan Pemikir) di atas adalah meliputi beberapa tindakan, yakni:

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/konkrit mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
2. Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.

6. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang Cek Kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

Sedangkan pengendalian yang bersifat tidak langsung terhadap tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Satjipto Raharjo dan Anton Tabah 1993 Polisi Pelaku dan Pemikir) adalah meliputi:

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
4. Penimbulan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan kriminalitas yang akan dilakukan.

Menurut Satjipto Raharjo dan Anton Tabah (1993 Polisi Pelaku dan Pemikir) Adapun tindak pengendalian melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.
4. Mengikutsertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon korban kriminalitas, mengenai usaha-usaha pencegahan.
6. Peningkatan dan pengadaan program asuransi bagi masyarakat.

7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah-daerah perkotaan.

Satjipto Raharjo dan Anton Tabah (1993 Polisi Pelaku dan Pemikir) Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum terjadinya tindak kriminalitas selanjutnya adalah dengan menjuruskan hasil yang dicapai ke masa depan, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan angka kriminalitas/korban kejahatan.
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.
5. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Jika diperhatikan, cara-cara pengendalian keamanan yang telah dikemukakan di atas sifatnya adalah preventif, yakni sebelum terjadinya tindak kriminalitas. Di samping cara ini terdapat cara lain yang biasanya juga dilakukan, seperti dikemukakan oleh Simanjutak (1984:45) sebagai berikut:

1. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan;
2. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan moral;
3. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku.

Pada pokoknya pencegahan melalui perbaikan lingkungan setelah tindakan kejahatan dilakukan adalah dengan beberapa tindakan menurut Simanjutak (1984:45), yaitu:

1. Pengembangan sistem respon yang cepat, misalnya adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang

- berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan kriminal.
2. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman, misalnya keterangan ahli para ahli-ahli ilmu forensik sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan tindakan selanjutnya.
 3. Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer.
 4. Sistem komunikasi yang modern.
 5. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.

Sedangkan pencegahan tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya gangguan melalui perbaikan tingkah laku/perilaku, menurut Satjipto Raharjo dan Anton Tabah (1993 Polisi Pelaku dan Pemikir) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif mengenai pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.
2. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada umumnya.

Is Sumanto (1995:25) Adapun tindakan terakhir yang dapat dilakukan di dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban setelah terjadinya tindak kriminalitas (kejahatan) adalah dengan pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku, sebagai berikut:

1. Menyalurkan para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota.
2. Pengawasan atas perilaku kriminal.

Dengan demikian terlihat jelas unsur-unsur pengendalian tindak kriminalitas, di samping itu dapat pula diketahui upaya-upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan agar dapat menekan pertambahan tindak kejahatan/kriminalitas yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kota-kota besar seperti kota Makassar. Untuk itu upaya-upaya penanggulangan harus senantiasa dilakukan dengan berupaya meningkatkan kinerja aparat kepolisian secara kontinyu dan terus-menerus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kab. Mamuju khususnya di Mapolres Mamuju Sulawesi Barat. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memiliki lokasi penelitian tersebut adalah karena banyaknya anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat.

Dengan demikian, perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju yang semakin meningkat diharapkan dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dan hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dan responden anggota Kepolisian Resor Kota Mamuju yang menangani langsung masalah tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di kabupaten Mamuju.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi melalui wawancara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan mendatangi para responden.

b) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel - artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer.

D. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dan hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan secara kualitatif, dan kuantitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju

Minuman beralkohol merupakan suatu masalah yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda khususnya yang ada di Kab. Mamuju, yang dimana peredarannya sangat cepat kemasyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi waspada.

Masalah minuman beralkohol keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan pembahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju, maka berikut ini penulis akan menganalisis data dari Polres Mamuju selama kurang waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni dari tahun 2009-2012. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Data Jumlah Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kab. Mamuju

TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN	UMUR	KETERANGAN
2009	-	-	-
2010	2	13 & 15 tahun	Pengangguran
2011	1	17 tahun	Siswa SMA
2012	1	14 tahun	Siswa SMP
JUMLAH	4		

Sumber Data : Data dari Mapolres Mamuju

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak yang terjadi di Kab. Mamuju dari tahun 2009-2012 sebanyak 4 (empat) kasus.

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib yaitu pihak Kepolisian, sehingga termasuk kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari masyarakat dan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum lebih lagi dilakukan oleh anak yang masih

dibawah umur. Berikut tabel penelitian di lapangan dan hasil wawancara.

Tabel 2
Data Anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak ditangani oleh pihak Kepolisian atau *Hidden crime*

MULAI MENGKOMSUM SI TAHUN	NAMA PELAKU (NAMA SAMARAN)	UMUR	KETERANGAN
2009	• Lukman	15 tahun	Pengangguran
	• Ari	15 tahun	Siswa SMP
	• Najib	14 tahun	Pengangguran
2010	• Wawan	16 tahun	Siswa SMA
	• Bahri	16 tahun	Siswa SMA
	• Hendra	15 tahun	Pengangguran
	• Agus	17 tahun	Pengangguran
	• Andi	13 tahun	Pengangguran
2011	• Aling	16 tahun	Pengagguran
	• Rio	15 tahun	Pengangguran
	• Appi	12 tahun	Pengangguran
	• Elung	17 tahun	Siswa SMA
	• Irfan	14 tahun	Siswa SMP
2012	• Ewink	15 tahun	Siswa SMP
	• Ridwan	16 tahun	Siswa SMA
	• Ansar	14 tahun	Pengangguran

	<ul style="list-style-type: none"> • Wandu • Cimmang • Nurwan 	15 tahun 13 tahun 15 tahun	Pengangguran Pengangguran Siswa SMP
Jumlah	19		

Sumber Data : Penelitian Lapangan dan hasil Wawancara Tahun 2013 - 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju yang tidak dilaporkan oleh pihak berwajib atau *hidden crime* yang banyak dilakukan oleh anak atau remaja yang dimana rata-rata berumur antara 12-17 tahun pada tahun 2009-2012 yang berjumlah 19 pelaku.

Tabel 3
Data umur Pelaku Penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju

UMUR PELAKU	JUMLAH	PERSEN(%)
12-13 tahun	3	15%
14-15 tahun	9	45%
16-17 tahun	7	40%
JUMLAH	19	100%

Sumber Data Mapolres Mamuju dan Penelitian Lapangan Wawancara Tahun 2013 – 2014

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur 12-13 tahun terdapat 3 orang atau sekitar 15%, yang berumur 14-15 tahun terdapat 9 orang atau sekitar 45%, yang berumur 16-17 tahun terdapat 7 orang atau sekitar 40%. Dari data di atas dapat disimpulkan umur pelaku Anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang paling banyak dilakukan di Kab. Mamuju yaitu umur 14-15 tahun.

Tabel 4
Data tingkat pendidikan pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol
Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kab. Mamuju

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN
SD	-	0%
SMP	3	15%
SMA/SMK	9	45%
Pengangguran	7	40%
Jumlah	19	100%

Sumber Data : Penelitian di Lapangan dan Wawancara dan Data dari Mapolres Mamuju.

Berdasarkan data tabel 4 di atas, maka diketahui dari pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju terdapat tingkat pendidikan pelaku adalah pelajar SMP dan SMA. Dengan rincian sebagai berikut : jumlah pelaku pendidikan SMP ada 3 orang atau sekitar 15%, yang berpendidikan SMA atau SMK ada 9 orang atau sekitar 45%, dan

yang tidak memiliki pendidikan atau pengangguran ada 7 orang atau sekitar 40%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju Setengahnya adalah orang berpendidikan.

Berdasarkan penelitian di atas bahwa sebenarnya masih banyak yang belum terungkap disebabkan sulitnya peneliti untuk mencari pelaku (anak) untuk mengungkap kasus-kasus semacam ini karena adanya beberapa faktor.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju

Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju, dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh 50 orang responden dan pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kab. Mamuju pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 5
Pendapat Responden Tentang Faktor Penyebab Terjadinya
Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang Dilakukan Oleh Anak Di
Kabupaten Mamuju

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persen (%)
1.	Rasa ingin tau	10	20%
2.	Ikut-ikutan teman	15	30%
3.	Lingkungan pergaulan	15	30%
4.	Lingkungan keluarga	5	10%
5.	Penjualan secara bebas	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber Data : diolah dari hasil angket, tahun 2013 - 2014 dan wawancara di lapangan.

Berdasarkan dari hasil 50 responden dari tabel 5 di atas maka dapat dilihat bahwa, 10 orang atau 20 % yang memberikan jawaban bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju, disebabkan akibat tingginya rasa ingin tahu terhadap minuman yang dapat merusak kesehatan, 15 orang atau 30% menjawab, bahwa salah satu faktor anak mengkonsumsi minuman beralkohol, disebabkan karena ikut-ikutan oleh teman, 15 orang atau 30% karena pengaruh lingkungan pergaulan, 5 orang atau 10% mengatakan karena pengaruh kurangnya bimbingan dalam keluarga, dan juga

pengaruh penjualan secara bebas minuman itu sendiri berjumlah 5 orang atau 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol akibat pengaruh lingkungan pergaulan.

Menurut data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

1. Rasa ingin tahu

Kemajaun zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negatif yang dilarang dalam norma-norma dalam masyarakat pun menjadi tren dikalangan anak muda saat ini. Salah satunya adalah mabuk-mabukan diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan rusaknya generasi muda. Salah satu faktor karena tingginya rasa ingin tahu terhadap minuman yang dapat merusak kesehatan tersebut.

Menurut salah satu anggota unit Reskrim Polres Mamuju Briptu Siswanto (wawancara tanggal 06 desember 2013), faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak mengkonsumsi

minuman beralkohol adalah karena faktor rasa ingin tahu dari anak yang terlalu tinggi sehingga ingin mencoba.

2. Ikut-ikutan teman.

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika seseorang orang anak yang ingin mencoba, juga karena faktor ikut-ikutan oleh teman. Dan akan terpengaruh dengan teman-teman serta terus penasaran dengan minuman beralkohol. Faktor ini didukung oleh Briptu Siswanto (wawancara tanggal 6 desember 2013) dan beberapa pelaku yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang penulis wawancarai.

3. Lingkungan pergaulan.

Anak yang tinggal dan bergaul di lingkungan yang salah juga sangat berpengaruh sehingga anak mengkonsumsi minuman beralkohol karena dengan bergaul dengan orang yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol lambat laun akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar disebabkan anak sangat cepat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang belum pernah dilakukannya. Peristiwa ini dibenarkan oleh Lukman (nama samaran) yang tinggal di Jl. H. Andi Dai, Lingkungan Kasiwa Kab. Mamuju, (wawancara tanggal 24 desember 2013).

4. Lingkungan keluarga.

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu seseorang anak apabila kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya secara tidak langsung anak akan lebih dekat dengan teman bergaulnya.

Anak itu akan terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol karena faktor kedekatan dengan temannya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, bimbingan dan pesan dari orang tuanya untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, yang dimana anak apabila sering mendapat bimbingan dan nasehat dari orang tua untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol akan menjadi pertimbangan bagi anak tersebut untuk tidak melanggar perkataan orang tuanya.

Peristiwa ini terjadi karena kesibukan orang tua yang terlalu banyak sehingga waktu yang diberikan untuk anaknya berkurang. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Ari (nama samaran) yang tinggal di Jl. Mangga Kab. Mamuju (wawancara 4 Januari 2014).

5. Penjualan secara bebas.

Disamping itu sering ditemukan dalam lingkungan pergaulan kita sehari-hari, pelaku yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan tak jarang kita temui juga sebagian dari pelaku adalah anak dibawah umur dalam mengkonsumsi

minuman tersebut sehingga dengan kadar yang berlebihan maka akan mengurangi tingkat kesadaran seseorang yang meminumnya. Menurut Briptu Siswanto (wawancara tanggal 9 januari 2014), bahwa minuman keras (beralkohol) di Kab. Mamuju kendati sudah dilarang mengkonsumsi minuman keras (beralkohol) atau dengan seringnya dilakukan penggerebekan terhadap penjual minuman keras (beralkohol) yang tidak memiliki izin penjualan khususnya penjualan bebas namun anjuran dan larangan tersebut tetap tidak dihiraukan oleh para penjual/pelaku.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu dengan adanya tempat-tempat yang menyediakan atau menjual minuman keras yang lebih dikenal dengan restoran, bar, diskotik, kios-kios karaoke disekitar wilayah Kab. Mamuju, maka secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya orang-orang tertentu dapat memanfaatkan kesempatan seperti anak dengan beberapa alasan sehingga anak juga mengkonsumsinya.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penyebab Penyalagunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak yang terjadi di Kab. Mamuju. Namun demikian, mungkin masih banyak kasus yang belum terungkap, karena keterbatasan penulis untuk menelitinya.

C. Hambatan dan Upaya-upaya aparat penegak hukum dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju.

Dari hasil penelitian penulis melalui monitoring situasi dan wawancara dengan beberapa anggota Reskrim Polres Mamuju bahwa ada beberapa hambatan atau kendala-kendala sering yang dialami oleh pihak Polres Mamuju yaitu :

1. Kurangnya kerjasama antara aparat Kepolisian Polres Mamuju dengan masyarakat sekitarnya.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat sekitar karena masyarakat seringkali beranggapan bahwa Polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Akan tetapi masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana termasuk salah satunya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan jiwa mereka terutama ancaman yang datang dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju apabila sudah hilang kesadaran (wawancara dengan Briptu Siswanto Penyidik pada Polres Mamuju, tanggal 9 januari 2014).

2. Pelaku kadang-kadang berusaha menghilangkan jejak atau barang bukti.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Mapolsek Trans Kab. Mamuju tidak sedikit dari mereka pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju yang menghilangkan jejak agar terbebas dari penangkapan oleh aparat kepolisian dan ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti berupa botol-botol minuman keras pada waktu akan dilakukan penggeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit, pelaku meninggalkan wilayah hukum Polres Mamuju dan lain sebagainya.

3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukankan oleh anak di Kab. Mamuju.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju ,maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polres Mamuju sebagian besar belum memiliki pengalaman atau wawasan yang luas sebelum diangkat menjadi penyidik dalam menangani tindak pidana tersebut

Untuk dapat menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju, diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa aparat kepolisian di Polres Mamuju khususnya di Sat Reskrim yakni BRIPTU Siswanto (wawancara tanggal 09 Januari 2014), bahwa upaya penanggulangan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pertama adalah penanggulangan secara Preventif dan penanggulangan secara Represif. Kegiatan penanggulangan tersebut selama ini telah dilakukan namun belum optimal sehingga memperlihatkan frekuensi tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang melibatkan anak di Kab. Mamuju belum dapat diminimalisasi.

Agar memperjelas kedua upaya penanggulangan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dengan rutin melakukan razia ke tempat-tempat penjualan minuman keras, untuk mencegah maraknya peredaran minuman keras di masyarakat polisi juga melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya minuman keras yang beredar dimasyarakat. Karena tidak mungkin dari situlah awal muasal terjadinya penyalahgunaan minuman

beralkohol yang dilakukan oleh anak, tetapi tetap perlu diperhatikan segi keamanan maupun segi kesehatannya.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya, yang melalui pendekatan secara agama. Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres Mamuju.

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan anak yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

b. Upaya Represif

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparatur Pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak Kepolisian untuk

mengungkapkan kasus-kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing.

Dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan kepada aparat kepolisian apabila melihat anak sedang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk ditindak lanjuti oleh aparat.

Setiap pelaku maupun orang yang turut serta membantu dapat diberikan hukuman lebih berat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebagai upaya penyadaran agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dengan tidak melupakan dasar pertimbangan yang tepat sehingga putusan yang ditetapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

Demikian beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju. Namun demikian inti dari segala bentuk upaya tersebut, bukan sekedar teori belaka tetapi sesekali lagi penekanannya adalah bagaimana seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum mengaplikasikan selama semua itu dalam bentuk tindakan yang kongkrit

4. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya adalah kurangnya fasilitas kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polres Mamuju untuk mengadakan kegiatan patroli secara rutin pada setiap wilayah hukum yang dianggap rawan dan memerlukan pengawasan setiap saat. Akibatnya daerah-daerah tertentu tidak dapat dijangkau sehingga penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju tidak berjalan secara optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. (wawancara, Briptu Siswanto Penyidik pada Polres Mamuju, tanggal 09 Januari 2014).

Jadi, solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu penyuluhan tentang bahaya minuman beralkohol dengan benar. Jika dilihat kebelakang mengapa banyak anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol, karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya dari minuman beralkohol. Untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa minuman beralkohol tidak sesuai dengan agama dan berbahaya bagi kesehatan. Jika tidak ingin terjerumus kejalan yang salah tersebut maka berhati-hatilah dalam bergaul dan tidak menyentuh minuman tersebut sama sekali. Segala sesuatu itu ada

resikonya, untuk itu sebelum bertindak harus mulai berpikir dampak positif dan negatifnya.

Selain itu dalam rangka menekan Penyalagunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas Setidaknya dimulai dari setiap warga masyarakat berbuat dalam lingkungan keluarganya masing-masing. Perilaku menyimpang yang yang dilakukan oleh anak. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencengah dan mengurangi kejahatan tersebut.

D. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meneliti kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kab. Mamuju Sulawesi Barat.

Dalam menghadapi kasus kejahatan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri,. Kurangnya pengetahuan tentang akibat dari minuman beralkohol tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan.

Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit anak yang menjadi korban atas peredaran minuman beralkohol yang sangat meresahkan dan sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat khususnya anak.

Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi tempat perkumpulan anak yang sedang mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol karena mereka mengetahui tempat-tempat yang jauh dari jangkauan aparat.

Adapun kendala peneliti bahwa penelitian ini sangat merasa kesulitan untuk mendapatkan data pelaku Karena kurangnya informasi disebabkan minuman beralkohol dilarang untuk dikonsumsi terutama bagi anak, jadi peneliti mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan data tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju dari tahun 2009-2012. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diberbagai tempat. Seperti di Wilayah Kab. Mamuju, Mapolres Mamuju dan Masyarakat umum.

Dengan jumlah penelitian pelaku Penyalahgunaan Minuman Bealkohol Yang Dilakukan Oleh Anak adalah 19 orang, ada 4 orang ditangani pihak berwajib sedangkan 19 orang merupakan data yang terselubung (*hidden crime*). Berikut beberapa pembahasan yang merupakan hasil penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju, sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data dari kepolisian dan data yang terselubung (*hidden crime*) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol disebabkan karena lingkungan pergaulan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan

masyarakat tetapi juga karena kurangnya perhatian dari orang tuanya.

2. Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak ini, juga sering ditemui di kalangan masyarakat khususnya di kalangan muda-mudi yang berumur sekitar 12-17 tahun yang disebabkan karena faktor lingkungan. Kejadian seperti ini dapat dicegah atau dinanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu :

- Upaya secara preventif
- Upaya secara represif

B. Saran-saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus ini, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini.
2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus (pelaku) yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional.
3. Selain itu aparat kepolisian juga diharapkan agar dapat berkompeten mengenai masalah ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan di daerah-daerah yang dianggap rawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S.& Amir Ilyas, 2010: *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Abdulsani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Arief Gosita, 1993. *Kriminalitas di Daerah Perkotaan*. Jilid I, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
- Beccaria., *On Crimes and Punishments*, Diterjemahkan oleh Hendry Paolucci, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1963
- Bonger, W. A, 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1982. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta
- Edi Sudrajat dan Yadi Sastro, 1992. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta, Bandung
- Google Internet Service, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada anak, pengertian anak*.
- Ichsan Achmad, 1979. *Hukum Pidana I*. Bimbingan Masalah Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KHUPer) pengertian Anak
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandar Maju, Jakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prof. Dr. Sudikno, Prof. Dr. Romli Atmasasmita 2007 , *Peradilan Anak Di Indonesia*
- Pusat Info Data Indonesia, 2006. *Pengawasan & Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan & Peizinan minuman beralkohol*

&ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Pusat Info Data Indonsia, Jakarta. .

Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soejono, D., 1986, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

United Nation Convention On Right Of The Child book 1989 *Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)*

Weda, Made Dharma, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro., 2003. *Azas - azas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Jakarta.